



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)
UNIT KERJA : UNIT INDUK PEMBANGUNAN SUMATERA BAGIAN SELATAN (UIP SBS)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZAKY ADIKTA
2. Jabatan : GENERAL MANAGER
3. NHK : 476972

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	11.974.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.824.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, LAINNYA Rp. 1.950.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	1.222.250.000
1. MOTOR, HONDA R2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 431.250.000		
3. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 Tahun 2024, HASIL SENDIRI , LAINNYA , Rp. 790.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.612.198.278
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	15.808.448.278



III. HUTANG

Rp. 2.860.546.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 12.947.902.278

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.